

RINGKASAN

Markus Alexander Simangunsong Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam
210510150 Melakukan Pengawasan Atas Putusan Yang
 Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus di
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
 Lhokseumawe

(Harun, S.H., M.H. dan Tasyukur, S.H., M.H.)

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan fase krusial dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin hak-hak narapidana dan tercapainya tujuan pemidanaan. Institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT), yang diatur dalam KUHAP, memegang peran sentral dalam pengawasan ini. Namun, terdapat kesenjangan antara mandat normatif, seperti kewajiban kunjungan triwulan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985, dengan praktik di Lapas Kelas II A Lhokseumawe di mana kunjungan hanya dilakukan dua kali setahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran KIMWASMAT dijalankan dalam mengawasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan empiris, yakni dengan cara mengumpulkan data primer dari informan, responden dan narasumber melalui wawancara yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi yang berlangsung dan menganalisisnya berdasarkan teori serta peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian adalah Lapas Kelas II A Lhokseumawe. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan wawancara dengan Hakim Wasmat, Kasi Bimbingan Narapidana, dan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KIMWASMAT di Lapas Kelas II A Lhokseumawe telah menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan belum maksimal. Dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala sistemik yang membuat hasil pengawasan belum bisa berjalan secara optimal. Hambatan internal utama meliputi beban kerja hakim yang padat, kewenangan yang bersifat rekomendatif tanpa daya paksa, kurangnya jumlah hakim, dan ketiadaan instrumen pendukung seperti buku register Wasmat. Hambatan eksternal yang signifikan adalah konflik regulasi antara SEMA No. 7 Tahun 1985 dengan peraturan biaya perjalanan dinas Kementerian Keuangan yang membatasi frekuensi kunjungan, usangnya SEMA itu sendiri, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan *overcrowding* yang melumpuhkan fungsi pengawasan.

Kata Kunci : Peran, Hakim Pengawas dan Pengamat, Pengawasan, Putusan

SUMMARY

Markus Alexander Simangunsong *The Role of the Supervisory and Observer Judge
in Overseeing Final and Binding Court
210510150 Decisions (A Case Study at Lhokseumawe Class
II A Correctional Institution)*

(Harun, S.H., M.H. dan Tasyukur, S.H., M.H.)

The supervision of sentence execution in Correctional Institutions (Lapas) is a crucial phase in the criminal justice system to guarantee inmates' rights and achieve correctional objectives. The institution of the Supervisory and Observer Judge (KIMWASMAT), regulated under the Criminal Procedure Code (KUHP), holds a central role in this supervision. However, a gap exists between the normative mandate, such as the quarterly visit obligation based on Supreme Court Circular (SEMA) Number 7 of 1985, and the practice at Lhokseumawe Class II A Correctional Institution, where visits are conducted only twice a year. This research aims to analyze in-depth how the role of KIMWASMAT is performed in overseeing final and binding decisions and to identify the obstacles and efforts faced in carrying out its supervisory functions. This study employs an empirical legal research method with a dual approach, examining law as a normative framework (das sollen) and as a social reality (das sein). The research is descriptive-analytical, aiming to describe ongoing conditions and analyze them based on theory and regulations. The research was conducted at the Lhokseumawe Class II A Correctional Institution. Data was collected through library research and field research involving interviews with the Supervisory Judge, the Head of Inmate Guidance, and inmates. The research findings indicate that the role of the Supervisory and Observer Judge (KIMWASMAT) at Class II A Lhokseumawe Penitentiary has not been carried out to its full potential. In its implementation, it faces various systemic obstacles that prevent the supervision from functioning optimally. Key internal obstacles include the heavy workload of judges, the recommendatory nature of their authority without enforcement power, an insufficient number of judges, and the absence of supporting instruments such as a WASMAT register book. Significant external obstacles are the regulatory conflict between Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 7 of 1985 and the Ministry of Finance's official travel expense regulations which limit the frequency of visits, the obsolescence of the SEMA itself, weak inter-agency coordination, and overcrowding that cripples the supervisory function.

Keywords : Role, Supervisory and Observer Judge, Supervision, decision

